

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYERAPAN TENAGA KERJA SEKTOR BASIS DI PROVINSI BALI

Ginda Jenifa Medah¹
I Wayan Wenagama²

^{1,2}Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Udayana (Unud), Bali, Indonesia
e-mail: gindajenifamedah@gmail.com / telp: +62 81337375968

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) sektor-sektor apa saja yang diklasifikasikan sebagai sektor basis dalam ekonomi Provinsi Bali dalam kurun waktu tahun 2000-2015; (2) bagaimana tren/kecenderungan penyerapan tenaga kerja di sektor basis dan non basis di Provinsi Bali pada masa periode tahun 2000-2015; (3) bagaimana pengaruh PDRB sektor basis, upah minimum dan pengeluaran pemerintah terhadap penyerapan tenaga kerja sektor basis di Provinsi Bali pada masa periode tahun 2000-2015. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara mencatat dari BPS dan Dinas pendapatan Daerah Provinsi Bali dari tahun 2000 sampai dengan 2015 untuk semua variabel. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis *Location Quotient* (LQ) dan analisis *Shift Share* (SS) dan untuk mengetahui pengaruh sector basis terhadap tenaga kerja digunakan *OLS Regresi Berganda*. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa (1) sektor yang diklasifikasikan sebagai sektor basis di Provinsi Bali dalam kurun waktu tahun 2000-2015 adalah listrik, gas dan air bersih, perdagangan, hotel dan restoran, serta angkutan dan komunikasi; (2) Penyerapan tenaga kerja di sektor basis dan non basis di Provinsi Bali pada periode tahun 2000-2015 mengalami peningkatan yang signifikan. (3) PDRB sektor basis, upah minimum dan pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor basis di Provinsi Bali pada masa periode tahun 2000-2015.

Kata Kunci: PDRB, upah minimum, pengeluaran pemerintah, penyerapan tenaga kerja

ABSTRACT

This study aimed to determine (1) what are the sectors that are classified as the basic sector of the economy of Bali Province in the period 2000-2015; (2) how the trends / tendency of employment in the sector and the non-base basis in Bali during the period 2000-2015; (3) how the influence of sector GDP basis, the minimum wage and government expenditure on employment sector in the province of Bali basis during the period of 2000-2015. The data in this study were collected by recording from CPMs and the Regional Office Bali Province of revenues from 2000 to 2015 for all variables. Analysis of the data used in this study is Location Quotient (LQ) and Shift Share analysis (SS) and to determine the effect on employment sector basis used OLS Regression. Based on the survey results revealed that (1) sectors that are classified as a sector basis in Bali Province in the period 2000-2015 is electricity, gas and water supply, trade, hotels and restaurants and transport and communications; (2) Employment in the sector and the non-base basis in Bali Province in the period 2000-2015 has increased significant; (3) The sector GDP basis, minimum wages and government spending and a significant positive effect on employment sector in the province of Bali basis during the period of 2000-2015.

Keywords: Gross Regional Domestic Product, minimum wages, government spending, labor absorption

PENDAHULUAN

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat madani dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (Undang-undang Otonomi Daerah 1999). Dalam kegiatan pembangunan yang semakin maju, peranan dan kemampuan daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah terus diusahakan untuk lebih meningkat selaras dengan pembangunan nasional serta mewujudkan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab. Oleh karena itu pemerintah memberikan otonomi daerah kepada daerah agar dapat menyelenggarakan pemerintahannya sendiri.

Kegiatan ekonomi daerah dari sudut pandang konsep basis ekonomi dikelompokkan ke dalam dua sektor yakni sektor basis dan sektor nonbasis. Sektor basis adalah semua kegiatan yang mendatangkan uang dari luar daerah (ekspor barang dan jasa). Sedangkan sektor non-basis adalah semua kegiatan ekonomi yang diperuntukkan bagi kebutuhan konsumsi lokal. Jika dilihat dari sudut pandang sektor *non-basis*, aktivitas sektor produksi meningkat kalau permintaan output (*demand*) meningkat (Mariana, 2014). Dengan demikian, sektor non basis terikat terhadap kondisi pendapatan masyarakat lokal. sehingga ekonomi daerah tidak bisa berkembang melebihi pertumbuhan alamiah daerah (tidak bebas tumbuh).

Sementara itu, dari sudut pandang sektor basis permintaan output sektor produksi tidak hanya terbatas pada permintaan lokal tetapi juga oleh permintaan daerah lain (ekspor). Konsep basis ekonomi beranggapan bahwa permintaan terhadap input hanya dapat meningkat melalui perluasan permintaan terhadap output yang diproduksi oleh sektor basis (ekspor) dan sektor non basis (lokal). Permintaan terhadap produksi sektor non-basis hanya dapat meningkat apabila pendapatan lokal meningkat. Namun, peningkatan pendapatan lokal ini akan terbatas apabila perekonomiannya hanya mengandalkan pada sektor nonbasis. Sedangkan suatu perekonomian yang mampu mengembangkan dan meningkatkan sektor basis, maka sektor basis akan mendorong sektor nonbasis sehingga pendapatan lokal akan meningkat melebihi peningkatan pendapatan lokal yang hanya mengandalkan sektor nonbasis. Dengan demikian, ekspor daerah (regional) merupakan penentu dalam pembangunan ekonomi daerah (Saragih, 2013).

Kenaikan tingkat upah jelas akan meningkatkan daya beli masyarakat namun sebaliknya jika dilihat dari sisi perusahaan karena perusahaan cenderung akan menekan jumlah penggunaan tenaga kerja sehingga dapat pula menurunkan penyerapan tenaga kerja (Indradewa, 2015). Sebuah daerah otonom menjadikan Provinsi Bali sudah tentu terus berupaya lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperluas penyerapan tenaga kerja. Upaya-upaya yang dilakukan daerah otonom adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, membiayai sektor-sektor yang tentunya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperhatikan kelayakan tingkat upah (Wijayanti, 2014).

Pembangunan ekonomi di Provinsi Bali masih memprioritaskan sektor perdagangan hotel dan restoran (PHR). Perkembangan sektor ini telah menyebabkan migrasi masuk yang cukup tinggi ke daerah ini. Penduduk yang datang ingin mendapatkan pekerjaan walau tidak semua ditunjang oleh kemampuan dan keahlian yang memadai sehingga dapat mengakibatkan penawaran tenaga kerja yang melebihi permintaannya yang pada akhirnya akan mempengaruhi angka penyerapan tenaga kerja (Priyasmini, 2016). Menurut Manning (1998) tingginya tingkat pengangguran di daerah perkotaan di dipengaruhi oleh proses pencarian kerja dan struktur upah. Data pertumbuhan antar tahun menunjukkan bahwa dalam rentang yang lebih lama pertumbuhan ekonomi menunjukkan percepatan terkecuali sektor Pertanian dan sektor Listrik, Gas dan Air Bersih, Sementara itu sektor-sektor lain memiliki level pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan dengan sebelumnya.

Tabel 1. Rata-Rata Pertumbuhan Sektor-sektor Ekonomi Bali Tahun 2000-2005. 2000-2010. 2000-2013 (Persen)

Sektor	Rata-rata Pertumbuhan		
	2000-2005	2000-2010	2000-2013
1. Pertanian	4,12	3,69	3,38
2. Pertambangan & Penggalian	3,16	5,17	6,66
3. Industri Pengolahan	4,75	5,57	5,51
4. Listrik, Gas & Air Bersih	8,65	7,51	7,69
5. Konstruksi	3,61	4,87	6,26
6. Perdag.. Hotel & Restoran	3,49	5,15	5,51
7. Pengangkutan & Komunikasi	3,31	5,26	5,54
8. Keu. Real Estat. & Jasa Perusahaan	4,65	4,56	5,27
9. Jasa-Jasa	4,90	5,23	6,24
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	4,06	4,87	5,22

Sumber :BPS Bali (Data Diolah), 2014

Tabel 1 menunjukkan rata-rata pertumbuhan PDRB dari tahun 200-2005 sebesar 4,06 persen. tahun 2000-2010 sebesar 4,87 persen dan tahun 2000-2013 sebesar 5,22 persen. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali tahun 2000-

2013 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi per sektor cenderung berfluktuasi. Dalam kurun waktu dua belas tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan tertinggi dialami oleh sektor listrik, gas dan air minum yang diikuti oleh sektor jasa yaitu sebesar 7,7 persen dan 6,2 persen. Sementara untuk sektor prioritas yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran dan sektor pertanian rata-rata mengalami pertumbuhan sebesar 5,5 persen dan 3,4 persen.

Nilai PDRB Provinsi Bali menurut harga berlaku di tahun 2015 mencapai 101,26 Trilyun Rupiah. Angka ini meningkat sekitar 2,4 trilyun Rupiah dibandingkan dengan tahun 2014. Sementara itu dibandingkan dengan tahun 2013 PDRB Bali menurut harga berlaku meningkat sekitar 5,3 trilyun Rupiah.

Tabel 2. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Bali Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2013 (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Pertanian	12.098.703,21	12.742.670,33	14.133.918,42	15.902.860,73	16.698.003,77	17.031.963,84
Pertambangan & Penggalian	471.151,60	544.960,10	660.010,01	758.205,39	796.115,66	812.037,97
Industri Pengolahan	6.151.814,64	6.606.301,98	7.470.929,25	8.241.758,46	8.653.846,38	8.826.923,31
Listrik, Gas & Air Bersih	1.263.308,88	1.429.611,41	1.703.888,59	1.970.756,04	2.069.293,84	2.110.679,72
Konstruksi	3.033.986,71	3.440.423,58	4.351.426,23	4.862.732,46	5.105.869,08	5.207.986,46
Perdag.. hotel & Restoran	20.196.293,72	22.695.918,86	25.372.053,61	28.259.736,89	29.672.723,73	30.266.178,21
Pengangkutan & Komunikasi	9.683.288,91	10.688.612,78	12.299.191,24	13.476.642,81	14.150.474,95	14.433.484,45
Keu. Real estat. & Jasa Perusahaan	4.619.316,33	5.023.886,97	5.663.392,83	6.371.557,30	6.690.135,17	6.823.937,87
Jasa-Jasa	9.676.373,15	10.856.771,53	12.284.484,03	14.711.523,24	15.447.099,40	15.756.041,39
PDRB	67.194.237,15	74.029.157,55	83.939.294,21	94.555.773,32	99.283.561,99	101.269.233,23

Sumber: BPS (data diolah), 2016.

Jika dilihat dari sisi pengeluaran pembangunan, terlihat bahwa pengeluaran pertahun cenderung mengalami peningkatan. Seperti disampaikan

sebelumnya. pengeluaran pemerintah merupakan salah satu instrumen bagi peningkatan daya beli masyarakat jika pengeluaran tersebut telah menyentuh kegiatan ekonomi masyarakat. Untuk itu kiranya masih perlu dikaji apakah peningkatan pengeluaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam kurun waktu tersebut sudah dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja sektoral.

Sampai saat ini pendekatan sektoral masih merupakan salah satu strategi dalam pembangunan daerah. Pendekatan sektor basis ini lebih menekankan pada pemilihan sektor-sektor ekonomi yang dapat lebih tepat dan cepat berperan sebagai penggerak ekonomi daerah, penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan (Kusuma, 2015). Hal ini tentu menarik untuk dikaji lebih lanjut, karena fakta menunjukkan bahwa sektor perdagangan, hotel dan restoran (PHR) sampai saat ini masih menempati sebagai sektor dominan kontribusinya dalam PDRB Provinsi Bali. Pengukuran sektor unggulan dapat dilihat dari sisi penyerapan tenaga kerja (Putri, 2012) . Menurut Sirait (2013), kesempatan kerja yang tersedia dan kualitas tenaga kerja yang digunakan akan menentukan proses pembangunan ekonomi. Dengan demikian, tenaga kerja merupakan sumber daya untuk menjalankan proses produksi dan juga distribusi barang dan jasa (Suwandika, 2015).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) sektor-sektor apa saja yang diklasifikasikan sebagai sektor basis dalam ekonomi Provinsi Bali dalam kurun waktu tahun 2000 - 2015?; (2) tren penyerapan tenaga kerja di sektor basis dan non basis di Provinsi Bali pada periode tahun 2000-2015; (3) pengaruh PDRB

sektor basis, upah minimum dan pengeluaran pemerintah terhadap penyerapan tenaga kerja sektor basis di Provinsi Bali pada periode tahun 2000-2015.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini diawali dengan menetapkan tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan "bukti" secara kuantitatif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja sektor basis di Provinsi Bali. Dalam penelitian ini, menggunakan 1 (satu) variabel *dependent* yaitu penyerapan tenaga kerja, 3 (tiga) variabel *independent* yaitu PDRB, upah minimum dan pengeluaran pemerintah. Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk "membuktikan" dan menganalisis pengaruh variabel independen yaitu PDRB, upah minimum dan pengeluaran pemerintah terhadap variabel dependen yaitu penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian penjelasan atau *explanatory research*, yang akan menjelaskan hubungan kausal antara variabel independen tersebut terhadap variabel dependen melalui pengujian hipotesis (Sugiyono, 2012: 98). Selain itu dalam penelitian ini juga digunakan analisis deskriptif untuk mengklasifikasikan sektor-sektor perekonomian kedalam sektor basis maupun non-basis menggunakan analisis *Location Quotient (LQ)* dan *Shift Share (SS)*.

Obyek penelitian dan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah data PDRB, Upah Minimum, Pengeluaran Pemerintah dan Penyerapan Tenaga Kerja di provinsi Bali tahun 2000 sampai dengan tahun 2015. Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu variabel *dependent* dan variabel *independent*. Variabel *independent* adalah variabel yang nilainya tidak tergantung variabel lain, sedangkan variabel *dependent* adalah variabel yang nilainya tergantung dari

variabel bebas (Sugiyono, 2012 : 98). Variabel bebas (*eksogen*) dalam penelitian ini adalah PDRB, upah minimum, dan pengeluaran pemerintah, sedangkan variabel terikat (*endogen*) adalah penyerapan tenaga kerja.

Cooper dan Schindler, (2014: 162) menyatakan bahwa definisi operasional variabel penelitian merupakan penentuan *construct* dengan berbagai nilai untuk memberikan gambaran mengenai fenomena sehingga dapat diukur. *Construct* merupakan abstraksi dari fenomena atau realitas yang untuk keperluan penelitian harus dioperasionalisasikan dalam bentuk variabel yang diukur dengan berbagai nilai. Adapun definisi operasional variabelnya adalah sebagai berikut. Penyerapan tenaga kerja adalah banyaknya lapangan kerja yang sudah terisi yang tercermin dari banyaknya jumlah penduduk bekerja di Kabupaten Semarang. Penyerapan tenaga kerja dalam penelitian ini dapat dikatakan sebagai permintaan tenaga kerja di Provinsi Bali. Jumlah penduduk bekerja atau bisa disebut dengan pekerja dinyatakan dalam satuan orang.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah pendapatan total yang di peroleh secara domestik, termasuk pendapatan yang diperoleh faktor-faktor produksi yang dimiliki asing, pengeluaran total atas barang dan jasa yang diproduksi secara domestik. Atau adalah nilai pasar semua barang dan jasa akhir yang di produksi dalam perekonomian dalam kurun waktu tertentu.

Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Upah ini berlaku bagi mereka yang lajang dan memiliki pengalaman kerja 0-1 tahun, berfungsi sebagai jaring pengaman, ditetapkan melalui Keputusan Gubernur berdasarkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan dan berlaku selama 1 tahun berjalan. Satuan Upah Minimum dinyatakan dalam Rupiah.

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah harus menyediakan barang publik, karena tidak ada sektor swasta yang mau menyediakan barang yang dimiknati orang banyak. Aktivitas pemerintah akan beralih dari penyediaan sarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial yang pada akhirnya dapat meningkatkan kegiatan ekonomi.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder yang digunakan dalam bentuk *time series* adalah PDRB, Upah Minimum, Pengeluaran Pemerintah dan Penyerapan Tenaga Kerja di provinsi Bali tahun 2000 sampai dengan tahun 2015 yang diperoleh dari berbagai sumber seperti, BPS dan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Bali

Menurut Bungin (2013: 42), metode pengumpulan data adalah “dengan cara apa dan bagaimana data yang diperlukan dapat dikumpulkan sehingga hasil akhir penelitian mampu menyajikan informasi yang *valid* dan *reliable*”. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. Menurut Arikunto (2012:206) metode dokumentasi adalah mencari data yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara mencatat dari BPS dan Dinas pendapatan Daerah dari tahun 2000 sampai dengan 2015 untuk semua variabel.

Sesuai dengan tujuan penelitian data-data yang di peroleh dalam penelitian ini, dianalisis dengan pendekatan kuantitatif untuk mengetahui peranan sektor

basis dalam penyerapan tenaga kerja di gunakan analisis *Location Quotient* (LQ) dan analisis *Shift Share* (SS) dan untuk mengetahui pengaruh sector basis terhadap tenaga kerja digunakan *OLS Regresi Berganda* dengan menggunakan *software SPSS 15. for windows*.

Menurut Richardson (2011) dengan pendekatan secara tidak langsung yang memisahkan antara sektor basis dan non basis maka perhitungan LQ untuk mengetahui sektor basis dan non basis dalam perekonomian Propinsi Bali dapat digunakan rumus sebagai berikut:

$$LQ_i = \frac{\text{Presentase PDRBsektori regional}}{\text{Presentase PDBsektori nasional}} \dots\dots\dots(1)$$

Apabila nilai $LQ > 1$ menunjukkan sektor i adalah kegiatan basis (ekspor) sedangkan bila nilai $LQ < 1$ menunjukkan kegiatan sektor tersebut adalah kegiatan non basis (lokal). Identifikasi sektor yang digolongkan sebagai sektor basis dalam perekonomian Provinsi Bali kemudian dibandingkan dengan sektor yang dianggap maju (sektor utama) dalam perekonomian daerah yang sama. Tujuannya adalah untuk melihat kesesuaian antara sektor basis dengan sektor yang dianggap maju (sektor utama) dalam perekonomian Propinsi Bali. Untuk melihat peranan sektoral dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dapat diketahui melalui pendekatan basis ekonomi dan pendekatan struktural.

Perubahan dan pergeseran sector pada perekonomian suatu daerah digunakan analisis *Shift Share*. Hasil analisis untuk mengidentifikasi sumber atau komponen pertumbuhan dari suatu wilayah, sehingga dapat diidentifikasi pertumbuhan sector-sektor di dalam suatu wilayah relative terhadap wilayah yang lebih besar, dan juga sekaligus dapat mengukur perbandingan kemajuan relative

suatu wilayah dibandingkan dengan wilayah lainnya. Adapun formulasi dari *Shift*

Share analysis adalah sebagai berikut (Sugeng Budiharsono, 2013).

$$\begin{aligned} G_j &= Y_{jt} + Y_{jo} \\ &= (N_j + P_j + D_j) \\ N_j &= Y_{jo} (Y_t/Y_o) - Y_{jo} \\ P_j &= \sum [(Y_{it}/Y_{io}) - (Y_t/Y_o)] Y_{ijo} \\ D_j &= \sum [(Y_{iit} - (Y_{it}/Y_{io}) Y_{ijo})] \end{aligned}$$

Dimana:

- G_j = Pertambahan absolute PDRB di daerah j (Provinsi)
- Y_{jt} = PDRB di Provinsi j pada tahun t
- Y_{jo} = PDRB di Provinsi j pada tahun o
- N_j = Komponen *share*/pertambahan relative PDRB Provinsi j dengan memperhitungkan Provinsi Bali
- Y_t = PDB Nasional pada tahun t
- Y_o = PDB Nasional pada tahun o
- P_j = *Proportional Shift*
- D_j = *Differential Shift*
- Y_{it} = Nilai tambah PDB Nasional sector I pada tahun t
- Y_{io} = Nilai tambah PDB Nasional sector I pada tahun o
- Y_{ijt} = Nilai tambah PDRB Provinsi j untuk sector i pada tahun t
- Y_{ijo} = Nilai Tambah PDRB Provinsi j untuk sector i pada tahun o

Kedua komponen shift, yaitu *proportional Shift* (P_j) dan *Differential Shift* (D_j) memisahkan unsure-unsur pertumbuhan regional yang bersifat eksternal dan internal. *Proportional Shift* (P_j) merupakan akibat pengaruh unsure-unsur eksternal yang bekerja di tingkat provinsi, sedangkan *Differential Shift* (D_j) merupakan akibat dari pengaruh factor-faktor yang bekerja di dalam daerah yang bersangkutan (Glasson, 2014).

Apabila *Proportional Shift* bernilai positif ($P_j > 0$), berarti daerah Kabupaten/Kota tersebut berspesialisasi pada sector yang tumbuh dengan cepat pada tingkat provinsi. Sebaliknya bila P_j bernilai negative ($P_j < 0$) daerah berspesialisasi pada sector yang tumbuh dengan lambat di provinsi. Jika *Differential Shift* bernilai positif ($D_j > 0$), berarti pertumbuhan suatu sector

perekonomian daerah adalah lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan sector yang bersangkutan pada tingkat propinsi dikarenakan faktor lokasional intern. Hal ini juga menunjukkan bahwa sector tersebut mempunyai keunggulan kompetitif (daya saing) yang baik. Sebaliknya apabila nilai $D_j < 0$, berarti pertumbuhan suatu sector perekonomian di daerah adalah lebih lambat dibandingkan pertumbuhan sector yang sama di tingkat provinsi atau tidak memiliki kemampuan daya saing yang baik.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah metode analisis regresi. Dalam analisis regresi akan dikembangkan sebuah *estimating equation* (persamaan regresi) yaitu formula matematika yang mencari nilai variabel dependen dari nilai independent yang diketahui. Analisis regresi digunakan terutama untuk peramalan, dimana dalam model tersebut terdapat sebuah variabel dependen dan variabel independen. Dalam prakteknya, metode analisis regresi sering dibedakan antara *simple regression* dan *multiple regression*. Disebut *simple regression* jika hanya ada satu variabel independen, sedangkan disebut *multiple regression*, jika ada lebih dari satu variabel independen.

Penelitian ini terdapat 1 (satu) variabel dependen yaitu penyerapan tenaga kerja, dan 3 (tiga) variabel independen yaitu PDRB, upah minimum dan pengeluaran pemerintah. Berdasarkan hal tersebut maka metode analisis yang digunakan adalah *multiple regression*, yang persamaannya dapat dikemukakan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e \dots \dots \dots (2)$$

Keterangan :

Y = Penyerapan Tenaga Kerja
 α = konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$, = Koefisien regresi masing-masing variabel independen

X_1 = PDRB

X_2 = Umpah Minimum

X_3 = Pengeluaran Pemerintah

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis *Location Quotient* (LQ)

Teknik *Location Quotient* (LQ) mengukur konsentrasi dari suatu kegiatan (industri) dalam suatu daerah dengan cara membandingkan peranannya dalam perekonomian daerah itu dengan peranan kegiatan atau industri sejenis dalam perekonomian regional atau nasional.

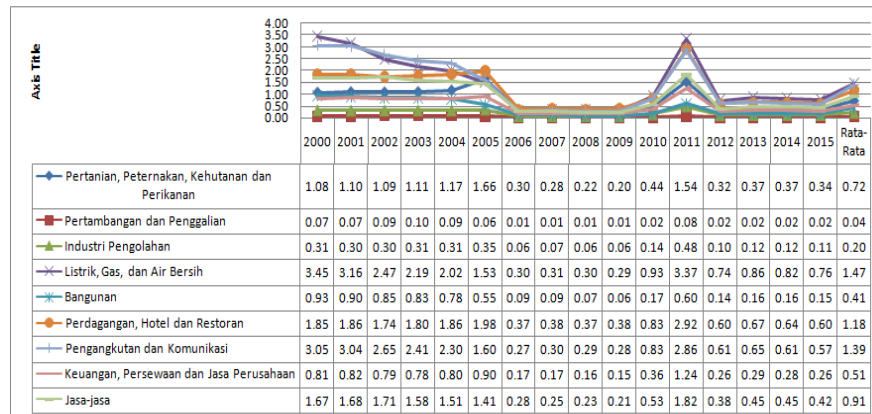
Analisis ini merupakan penentuan suatu komoditi apakah termasuk komoditi unggulan atau bukan unggulan dalam suatu wilayah provinsi tertentu. Dikatakan komoditi unggulan bila koefisien $LQ > 1$, dan dikatakan komoditi bukan unggulan bila koefisien $LQ < 1$. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa sesuai dengan kriteria LQ yaitu, subsektor yang mempunyai koefisien $LQ > 1$ disebut kegiatan ekonomi potensial. Artinya subsektor dimaksud mempunyai prospek yang baik terhadap peningkatan perekonomian daerah Provinsi Bali, dan sebaliknya bila $LQ < 1$ disebut kegiatan ekonomi tidak potensial. Artinya subsektor dimaksud tidak mempunyai prospek yang baik terhadap peningkatan perekonomian daerah Provinsi Bali.

Hasil analisis LQ (kriteria kontribusi) PDRB sebagaimana disajikan dalam Gambar 1 menunjukkan bahwa sektor listrik, gas dan air bersih, perdagangan merupakan kegiatan ekonomi potensial daerah Provinsi Bali selama periode 2000-2015, karena selama periode tersebut sektor ini memiliki $LQ > 1$.

Faktor-Faktor Yang... [Ginda Jenifa Medah, I Wayan Wenagama]

Hasil analisis ini membuktikan pula bahwa kontribusi sektor listrik, gas dan air bersih di Provinsi Bali memiliki kontribusi yang lebih besar dibandingkan kontribusi sektor lainnya di tingkat Nasional.

Gambar 1. Hasil Analisis LQ menurut Sektor di Provinsi Bali



Sumber: Hasil olahan data, 2016

Sektor hotel dan restoran serta angkutan dan komunikasi memiliki LQ yang sangat tinggi karena kegiatan pariwisata yang menjadi sector andalan di Provinsi Bali. Sedangkan Sektor lainnya di daerah ini memiliki $LQ < 1$ dipengaruhi oleh daerah Provinsi Bali masih merupakan salah satu provinsi yang menjunjung hubum adat istiadat. Hasil analisis LQ secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Analisis LQ Provinsi Bali, 2000-2015

NO	LAPANGAN USAHA	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Kontri-busi
A	Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	1,08	1,10	1,09	1,11	1,17	1,66	0,30	0,28	0,22	0,20	0,44	1,54	0,32	0,37	0,37	0,34	0,72
B	Pertambangan dan Penggalian	0,07	0,07	0,09	0,10	0,09	0,06	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,08	0,02	0,02	0,02	0,02	0,04
C	Industri Pengolahan	0,31	0,30	0,30	0,31	0,31	0,35	0,06	0,07	0,06	0,06	0,14	0,48	0,10	0,12	0,12	0,11	0,20
D	Listrik, Gas, dan Air Bersih	3,45	3,16	2,47	2,19	2,02	1,53	0,30	0,31	0,30	0,29	0,93	3,37	0,74	0,86	0,82	0,76	1,47
E	Bangunan	0,93	0,90	0,85	0,83	0,78	0,55	0,09	0,09	0,07	0,06	0,17	0,60	0,14	0,16	0,16	0,15	0,41
F	Perdagangan, Hotel dan Restoran	1,85	1,86	1,74	1,80	1,86	1,98	0,37	0,38	0,37	0,38	0,83	2,92	0,60	0,67	0,64	0,60	1,18
G	Pengangkutan dan Komunikasi	3,05	3,04	2,65	2,41	2,30	1,60	0,27	0,30	0,29	0,28	0,83	2,86	0,61	0,65	0,61	0,57	1,39
H	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	0,81	0,82	0,79	0,78	0,80	0,90	0,17	0,17	0,16	0,15	0,36	1,24	0,26	0,29	0,28	0,26	0,51
I	Jasa-jasa	1,67	1,68	1,71	1,58	1,51	1,41	0,28	0,25	0,23	0,21	0,53	1,82	0,38	0,45	0,45	0,42	0,91
	TOTAL	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,18	0,18	0,16	0,16	0,38	1,31	0,28	0,32	0,31	0,29	6,84

Sumber : BPS Provinsi Bali 2016 (data sudah diolah)

Tabel 3. Implementasi Hasil LQ Provinsi Bali Tahun 2000-2015

No.	Sektor	Kont.	Ekspor (> 1)	Konsumsi	Impor (< 1)
1	Pertanian	0,72	-	137,96	-37,96
2	Pertambangan dan Penggalian	0,04	-	2.273,85	-2.173,85
3	Industri Pengolahan	0,20	-	500,90	-400,90
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	1,47	31,92	68,08	-
5	Bangunan	0,41	-	244,48	-144,48
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	1,18	15,13	84,87	-
7	Angkutan dan Komunikasi	1,39	28,29	71,71	-
	Keuangan, Persewaan dan jasa				
8	perusahaan	0,51	-	194,54	-94,54
9	Jasa-Jasa	0,91	-	109,93	-9,93

Sumber : BPS Provinsi Bali 2016 (data sudah diolah)

Dengan menggunakan metode LQ, diketahui bahwa di Provinsi Bali selama periode pengamatan (2000-2015) terdapat beberapa sektor kegiatan ekonomi yang bisa dijadikan sebagai sektor ekonomi basis atau potensial, hal ini dapat dilihat dari rata-rata angka rasio pada sektor ekonomi yang menunjukkan nilai lebih dari satu pada Tabel 3, sektor basis tersebut terdiri dari:

1. Listrik, Gas dan Air Bersih = 1,47
2. Perdagangan, Hotel dan Restoran = 1,18
3. Angkutan dan Komunikasi = 1,39

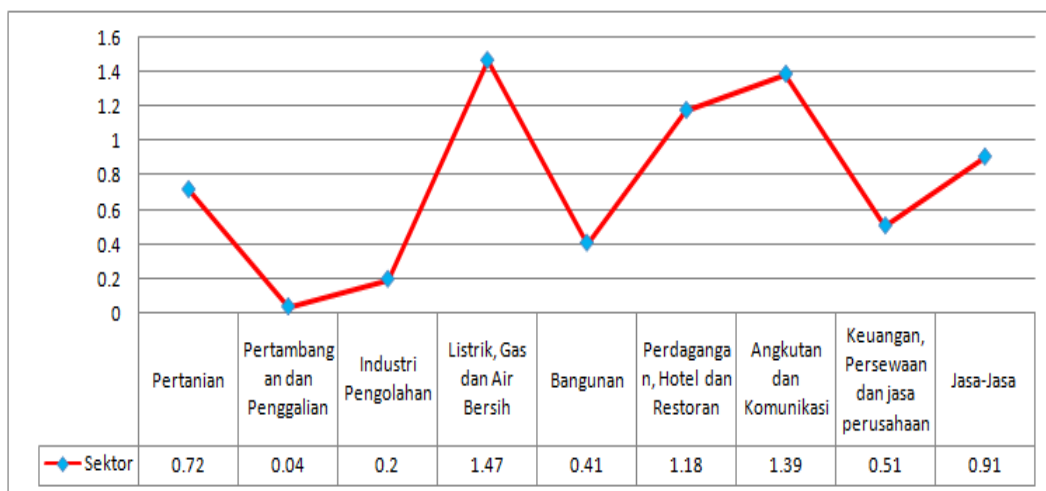
Sedangkan sektor non basis dalam penelitian adalah:

1. Pertanian = 0.72
2. Pertambangan dan Penggalian = 0.04
3. Industri Pengolahan = 0.20
4. Bangunan = 0.41
5. Keuangan, Persewaan dan jasa perusahaan = 0.51
6. Jasa-Jasa = 0.91

Analisis Tren dan Perbandingan

Analisis *Statistic Location Quotient (SLQ)* digunakan untuk menghitung perbandingan relatif sumbangan nilai tambah sebuah sektor di suatu daerah (propinsi) terhadap sumbangan nilai tambah sektor yang bersangkutan dalam skala nasional. Berdasarkan perhitungan SLQ selama periode waktu 2000-2015 (Tabel 4.2) di Provinsi Bali dengan menggunakan PDRB dan PDB Nasional, dapat diketahui sektor-sektor yang termasuk sektor basis dan non basis. Maka penentuan suatu sektor itu basis atau non basis didasarkan atas nilai bruto sektoral atas aktivitas produksinya. Berikut hasil perhitungan SLQ dari tahun 2000-2015.

Gambar 2. Hasil Analisis Trend SLQ Provinsi Bali Tahun 2000-2015



Sumber: data diolah, 2016.

Dynamic Location Quotient (DLQ) adalah modifikasi dari SLQ, dengan mengakomodasi faktor laju pertumbuhan keluaran sektor ekonomi dari waktu ke waktu. Pada penelitian ini, analisis DLQ digunakan untuk mengetahui sembilan sektor yang ada, manakah sektor unggulan di Provinsi Bali.

Tabel 4. Hasil Analisis Perbandingan Basis dan Non Basis DLQ Provinsi Bali Tahun 2000-2015

No	Sektor	Basis	Non Basis
1	Pertanian	-	0,72
2	Pertambangan dan Penggalian	-	0,04
3	Industri Pengolahan	-	0,20
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	1,47	-
5	Bangunan	-	0,41
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	1,18	-
7	Angkutan dan Komunikasi	1,39	-
8	Keuangan, Persewaan dan jasa perusahaan	-	0,51
9	Jasa-Jasa	-	0,91

Sumber: Hasil analisis, 2016

Analisis shift share ini digunakan untuk menganalisis perubahan struktur ekonomi Provinsi Bali relatif terhadap struktur ekonomi wilayah administratif Nasional sebagai referensi. Analisis *Shift-Share* digunakan untuk mengetahui kinerja (kontribusi) komoditi pertanian di Provinsi Bali, dipembahasan ini menunjukkan bahwa perubahan PDRB daerah kabupaten/kota selama periode analisis (2000-2015) dipengaruhi oleh komponen pertumbuhan daerah Nasional (N_{ij}), pembauran industri (M_{ij}), keunggulan kompetitif (C_{ij}) dan pengaruh pertumbuhan (D_{ij}).

PDRB daerah Provinsi Bali mengalami penurunan sebesar Rp. 50,123.16 (Milyar) selama periode 2000-2015, hal ini dapat dilihat pada Tabel 5. Penurunan tersebut terjadi pada sektor: (a) pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan) sebesar Rp. 7.574,91 (Milyar); (b) pertambangan dan penggalian Rp. 361,15 (Milyar); (c) industri pengolahan Rp. 3.925,74 (Milyar); (d) listrik, gas, dan air bersih Rp. 938,72 (Milyar); (e) bangunan/consstruksi Rp. 2.316,23 (Milyar); (f) perdagangan, hotel dan restoran Rp. 13.460,78 (Milyar); (g) pengangkutan dan komunikasi Rp. 6.419,24 (Milyar); (h) keuangan, persewaan dan jasa perusahaan Rp. 3.034,92 (Milyar); dan (i) jasa-jasa Rp. 7.007,45 (Milyar).

Tabel 5. Hasil Analisi *Shift-Share Struktur* Ekonomi Daerah Provinsi Bali, Periode 2000-2015

No	Lapangan Usaha	Nij ($N_{ij}=Y_{ij} \times r_n$)	$r_{in} - r_n$	Mij ($M_{ij}=Y_{ij}(r_{in}-r_n)$)	$r_{ij} - r_{in}$	Cij ($C_{ij}=Y_{ij}(r_{ij}-r_{in})$)	Dij ($D_{ij}=N_{ij}+M_{ij}+C_{ij}$)	Nilai (+/-)
A.	Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	7.574,91	5.81234	49.997,74	-5.713	-49.142,68	8.429,96	+
B.	Pertambangan dan Penggalian	361,15	5.39904	2.214,26	-5.300	-2.173,49	401,92	+
C.	Industri Pengolahan	3.925,74	5.27786	23.528,94	-5.178	-23.085,80	4.368,88	+
D.	Listrik, Gas, dan Air Bersih	938,72	9.26382	9.875,23	-9.164	-9.769,27	1.044,68	+
E.	Bangunan/Consstruksi	2.316,23	13.39580	35.234,91	-13.296	-34.973,46	2.577,69	+
F.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	13.460,78	5.68901	86.961,85	-5.590	-85.442,40	14.980,23	+
G.	Pengangkutan dan Komunikasi	6.419,24	11.34359	82.690,69	-11.244	-81.966,08	7.143,85	+
H.	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	3.034,92	5.82812	20.086,22	-5.729	-19.743,64	3.377,50	+
I.	Jasa-jasa	7.007,45	7.97058	63.426,65	-7.871	-62.635,65	7.798,44	+
T o t a l		45.039,15	0,00000	374.016,49	0.09940	-368.932,48	50.123,16	

Sumber : BPS Provinsi Bali 2016 (data sudah diolah)

Hasil analisis menunjukkan bahwa jika laju pertumbuhan daerah Provinsi Bali sama dengan laju pertumbuhan daerah Nasional, maka PDRB daerah Provinsi Bali akan mengalami peningkatan sebesar Rp. 45,039.15 (Milyar). Subsektor yang paling menonjol perannya terhadap kenaikan PDRB daerah Provinsi Bali yaitu sector perdagangan, hotel dan restoran sebesar Rp. 13,460.78 (Milyar).

Komponen ini memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan PDRB daerah Provinsi Bali, jika laju pertumbuhan sektor di daerah Nasional (r_{in}) lebih tinggi dibandingkan laju pertumbuhan PDRB daerah Nasional (r_n), begitu pula sebaliknya, maka sektor listrik, gas dan air bersih; perdagangan, hotel dan restoran; angkutan dan komunikasi memberikan pengaruh positif terhadap PDRB daerah Provinsi Bali, sedangkan sektor lainnya memberikan pengaruh positif.

Bauran industri memberikan pengaruh yang berbeda terhadap pembentukan PDRB daerah Provinsi Bali karena proporsi PDRB masing-masing sektor tidak sama. Pembentukan PDRB daerah Provinsi Bali tersebut terutama berasal dari: pengaruh positif sektor listrik, gas dan air bersih; perdagangan, hotel dan restoran; angkutan dan komunikasi di daerah provinsi Bali.

Hasil analisis menunjukkan bahwa PDRB daerah provinsi Bali tidak mengalami penurunan atau Rp. 0, juta karena pengaruh ketidak unggulan kompetitif (C_{ij}) sektor pertambangan dan penggalian. Hal ini menunjukkan bahwa laju pertumbuhan PDRB sektor tersebut di daerah Provinsi Bali lebih rendah dibandingkan sektor yang sama di daerah Nasional ($r_{ij} < r_{in}$). Analisis trend penyerapan tenaga kerja sektor basis terhadap periode waktu dapat digambarkan sebagai berikut.

Tabel 6. Analisis Trend Untuk Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Basis terhadap Periode Waktu

Variabel	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1009619.557	10488.421		96.260	.000
X.Periode.Waktu	18903.296	1137.629	.976	16.616	.000

Sumber: Hasil olahan data, 2016

Berdasarkan Tabel 6, persamaan penyerapan tenaga kerja sektor basis terhadap periode waktu dapat digambarkan sebagai berikut:

$$Y_1 = 1.009.619,557 + 18.903,296X \dots \dots \dots (1)$$

Berdasarkan persamaan di atas terlihat bahwa nilai β adalah positif 18.903,296. Artinya penyerapan tenaga kerja sektor basis dalam kurun waktu 2000-2015 mengalami peningkatan yang signifikan.

Tabel 7. Analisis Trend Untuk Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Non Basis terhadap Periode Waktu

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1071488.539	13218.155		81.062	.000
X.Periode.Waktu	7424.920	1433.710	.811	5.179	.000

Sumber: Hasil olahan data, 2016

Analisis trend penyerapan tenaga kerja sektor non basis terhadap periode waktu dapat digambarkan pada Tabel 7. Berdasarkan Tabel 7, maka persamaan penyerapan tenaga kerja sektor non basis terhadap periode waktu dapat digambarkan sebagai berikut.

$$Y_2 = 11.071.488,539 + 7.424,920X \dots\dots\dots(2)$$

Berdasarkan persamaan di atas terlihat bahwa nilai β adalah positif 7.424,920. Artinya penyerapan tenaga kerja sector basis dalam kurun waktu 2000-2015 mengalami peningkatan yang signifikan. Berdasarkan hasil analisa regresi yang dilakukan dengan menggunakan bantuan Program SPSS *ver 21 for windows* yang juga telah dipergunakan untuk uji signifikansi individual atau uji-t diperoleh Tabel 8 sebagai berikut.

Tabel 8. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	51,772	24,803		2,957	0,000
PDRB.Sektor.Basis	0,682	0,965	0,035	3,347	0,000
Upah.Minimum	0,986	0,225	0,183	3,283	0,000
Pengeluaran.Pemerintah	0,354	0,211	0,173	2,895	0,002

Sumber: Hasil olahan data, 2016

Berdasarkan Tabel 8, maka persamaan regresi yang di dapat adalah sebagai berikut.

$$\hat{Y} = 51.772 + 0,682 X_1 + 0,986 X_2 + 0,354 X_3 \dots \dots \dots (3)$$

Keterangan :

Y = Penyerapan tenaga kerja
 X_1 = PDRB sektor basis
 X_2 = Upah Minimum
 X_3 = Pengeluaran Pemerintah

Persamaan model matematis di atas menunjukkan bahwa pengaruh upah minimum lebih dominan daripada PDRB sector basis dan pengeluaran pemerintah terhadap penyerapan tenaga kerja. Hal itu ditunjukkan dari koefisien regresi upah minimum yaitu 0,986 lebih besar dari koefisien regresi PDRB sector basis yang bernilai 0,682 dan pengeluaran pemerintah yang bernilai 0,354.

Berdasarkan Tabel 9, dapat ketahui bahwa nilai probabilitas signifikansi atau *p value*-nya adalah 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0.05 atau 5 persen dan nilai F_{hitung} sebesar 62.479 lebih besar dari nilai F_{Tabel} sebesar 3,879 (nilai 3,879 berdasarkan nilai F-tabel) dengan demikian dapat dikatakan bahwa PDRB sektor basis, upah minimum dan pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor basis di Provinsi Bali pada masa periode tahun 2000-2015.

Tabel 9. Hasil Uji Simultan (Uji-F)

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	926795933802.792	3	308931977934.264	62.479	.000(a)
	Residual	59334940712.634	12	4944578392.719		
	Total	986130874515.425	15			

Sumber: Hasil olahan data, 2016

Hasil uji signifikansi parsial (uji-t) dengan menggunakan Program SPSS *ver 21 for windows* dapat dilihat pada Tabel 8. Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa nilai probabilitas signifikansi atau sig.-nya adalah 0,000 atau

lebih kecil dari 0,05 atau 5 persen. Selain itu berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 3,347 lebih besar dari nilai t_{tabel} sebesar 1,969. Karena $sig < 0,05$ dan nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} maka dikatakan bahwa hipotesis yang berbunyi PDRB sektor basis berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor basis di Provinsi Bali pada masa periode tahun 2000-2015 dapat dibuktikan.

Hal tersebut di dukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Dimas dan Nenik (2013) yang menyatakan bahwa PDRB memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di DKI Jakarta, dimana apabila PDRB meningkat satu persen maka penyerapan tenaga kerja meningkat sebesar 1,23 persen. Rakhmasari (2012) juga mengatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja salah satunya adalah PDRB dan memiliki hubungan positif yang selanjutnya diperkuat oleh hasil penelitian Ferdinan (2011) yang mengatakan bahwa besarnya PDRB merupakan faktor signifikan yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sumatera Barat yang juga memiliki pengaruh positif.

Budi Utami (2013) mengatakan bahwa Produk domestik regional bruto (PDRB) berpengaruh positif secara signifikan terhadap kesempatan kerja. PDRB merupakan cerminan dari pertumbuhan ekonomi (penambahan output yang dihasilkan), apabila PDRB meningkat maka jumlah kesempatan kerja akan semakin besar. Junaidi (2013) menyebutkan perkembangan PDRB memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sulawesi Utara. Putro dan Achma (2013) dalam penelitiannya menemukan bahwa

PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran, yang berarti peningkatan PDRB akan menurunkan jumlah pengangguran. Dengan kata lain, PDRB berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Meningkatnya jumlah PDRB juga akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan menurunkan jumlah pengangguran, dan begitu juga sebaliknya. Kesimpulannya, dari teori dan hasil penelitian-penelitian yang terdahulu PDRB memiliki pengaruh yang positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Apabila jumlah PDRB meningkat maka jumlah penyerapan tenaga kerja juga akan meningkat, begitu juga sebaliknya.

Hasil uji signifikansi parsial (uji-t) dengan menggunakan Program SPSS *ver 21 for windows* dapat dilihat pada Tabel 8. Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa nilai probabilitas signifikansi atau sig.-nya adalah 0,000 atau lebih kecil dari 0.05 atau 5 persen. Selain itu berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 3.283 lebih besar dari nilai t_{tabel} sebesar 1,969. Karena $sig < 0,05$ dan nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} maka dikatakan bahwa hipotesis yang berbunyi upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor basis di Provinsi Bali pada masa periode tahun 2000-2015 dapat dibuktikan.

Penelitian senada dilakukan oleh SMERU (2014) yang menyimpulkan bahwa kenaikan upah minimum riil berdampak negatif terhadap penyerapan tenaga kerja, dengan pengecualian bagi pekerja kerah putih. Dengan adanya kenaikan tingkat upah minimum maka perusahaan akan mengurangi sebagian tenaga kerja untuk digantikan dengan pekerja kerah putih. Hal ini juga menunjukkan bahwa setelah adanya kenaikan upah minimum perusahaan

mengubah proses produksi yang padat tenaga kerja dengan proses produksi yang lebih padat modal dan lebih menuntut keterampilan. Karena adanya saling keterkaitan antara modal dan keterampilan, maka proporsi pekerja kerah putih yang lebih tinggi menandai adanya pemanfaatan teknologi yang lebih padat modal.

Hasil uji signifikansi parsial (uji-t) dengan menggunakan Program SPSS *ver 21 for windows* dapat dilihat pada Tabel 8. Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa nilai probabilitas signifikansi atau sig.-nya adalah 0,002 atau lebih kecil dari 0.05 atau 5 persen. Selain itu berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 2.895 lebih besar dari nilai t_{tabel} sebesar 1,969. Karena $sig < 0,05$ dan nilai t -hitung lebih besar dari t -tabel maka dikatakan bahwa hipotesis yang berbunyi pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor basis di Provinsi Bali pada masa periode tahun 2000-2015 dapat dibuktikan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis maka dapat disimpulkan bahwa sektor yang diklasifikasikan sebagai sektor basis di Provinsi Bali dalam kurun waktu tahun 2000-2015 adalah listrik, gas dan air bersih, perdagangan, hotel dan restoran, serta angkutan dan komunikasi. Penyerapan tenaga kerja di sektor basis dan non basis di Provinsi Bali pada periode tahun 2000-2015 mengalami peningkatan yang signifikan. PDRB sektor basis, upah minimum dan pengeluaran pemerintah

berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor basis di Provinsi Bali pada periode tahun 2000-2015.

Saran

Saran yang dapat diberikan dari hasil analisis adalah pemerintah Provinsi Bali mengambil kebijakan penanganan masalah penyerapan tenaga kerja untuk tahun-tahun mendatang, hendaknya variabel PDRB, upah minimum dan pengeluaran pemerintah perlu diperhatikan sebagai indikator utama yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja pada provinsi tersebut disamping variabel yang lain. Peningkatan jumlah penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali harus terus diupayakan secara terus-menerus agar dapat mengurangi lebih banyak pengangguran lagi di tahun-tahun mendatang. Masyarakat diharapkan lebih inovatif dalam memanfaatkan peluang usaha dari berbagai sektor, sehingga dapat membantu pemerintah dalam program peningkatan kesejahteraan masyarakat.

REFERENSI

- Arikunto, Suharsimi. 2012. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Bellante, Don and Mark Janson. 2012. *Ekonomi Ketenagakerjaan*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Bungin, Burhan. 2013. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja. Grafindo Persada.
- Cooper, D.R. dan Schindler, P.S. 2014. *Business Research Methods*. New York: McGraw-Hill.
- Dornbusch, R dan S. Fische. 2014. *Exchange Rate and Current Account*, American Economic Review.
- Erawati, Komang. 2011. Analisis Pola Pertumbuhan Ekonomi dan Sektor Potensial Kabupaten Klungkung. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Unud*.

- Indradewa, I Gusti Agung dan Ketut Suardhika Natha. 2015. Pengaruh Inflasi, PDRB dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, 4(8), h: 873-1047.
- Jhingan, M.L. 2015. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kesuma, Ni Luh Aprilia., dan I Made Suyana Utama. 2015. Analisis Sektor Unggulan Dan Pergeseran Pangsa Sektor-Sektor Ekonomi Kabupaten Klungkung. *E-Jurnal EP Unud*, 4(3), h: 169 – 179.
- Kuncoro, Mudrajad. 2012. *Metode Kuantitatif; Teori dan Aplikasi untuk Bisnis dan Ekonomi, Edisi keempat*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Manning, Chris., and P. N. Junankar. 1998. Choosy Youth or Unwanted Youth? A Survey of Unemployment. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*. 34(1), pp: 55-93.
- Mariana. 2014. Pengaruh Pertumbuhan Investasi, Pertumbuhan Penyerapan Tenaga Kerja terhadap Perubahan Pertumbuhan Ekonomi dan Perubahan Struktur Ekonomi di Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana* 3(6), pp 330-344.
- Mentari, Ni Wayan dan I Nyoman Mahaendra Yasa. 2016. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Upah Terhadap Tingkat Pengangguran melalui Jumlah Investasi di Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, 5 (7), h: 778-798.
- Priyasmini, Ni Made dan Dewa Nyoman Budiana. 2016. Analisis Perubahan Struktur Ekonomi dan Tenaga Kerja di Kabupaten Badung. *E-Jurnal EP Unud*, 5(4), h: 1241-1264.
- Putri, Christina Hani dan Surya Dewi Rustariyuni. 2012. Analisis Struktur Perekonomian Bali: Pendekatan Shift Share. *E-Jurnal EP Unud*, 3(1), h: 111-120.
- Saragih, Juli Panglima. 2013. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Jakarta: Ghalia.
- Sirait, Novlin, 2013, Analisis beberapa faktor yang berpengaruh terhadap jumlah pengangguran Kabupaten / Kota di Provinsi Bali, *E- Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 2(2).

- Sjafii, Ahmad. 2013. Pengaruh Investasi Fisik dan Investasi Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur 1990-2004. *Jurnal Ekonomi Universitas Airlangga*. 1(1).
- SMERU. 2014, Dampak Kebijakan Upah Minimum terhadap Tingkat Upah dan Penyerapan Tenaga Kerja di DaerahPerkotaan Indonesia. *Ringkasan Eksekutif Laporan Penelitian SMERU*.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: CV. Alfabeta.
- Suryahadi, Devanto Shasa dan Saputra. 2013. *Upah dan Tenaga Kerja: Dampak Kebijakan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Sektor Formal Perkotaan*. Jakarta: Erlangga.
- Suwandika, P., dan Nyoman Mahaendra Yasa. 2015. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Pengangguran Di Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Unud*, 4 (7), h:794-810.
- Wijayanti, S., dan Ni Luh Putu Karmini.2014. Pengaruh Tingkat Inflasi, Laju Pertumbuhan Ekonomi Dan Upah Minimum Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Provinsi Bali. *E-Jurnal EP UNUD*, 3(10) h: 460-466.